

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelebagaan perlindungan remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran di Universitas Diponegoro, dapat disimpulkan bahwa proses pelebagaan yang dilakukan telah menunjukkan upaya institusional yang nyata, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Menggunakan teori institusional dari Scott (2008), pelebagaan dapat dianalisis melalui tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Ketiga pilar ini menjadi landasan dalam menilai sejauh mana lembaga-lembaga di lingkungan Universitas Diponegoro telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan terhadap remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran.

Pada aspek regulatif, Universitas Diponegoro telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 yang menjadi acuan formal dalam penanganan kekerasan seksual. Pembentukan struktur seperti Satgas PPKPT, FISIP Wellness Unit, serta peran organisasi kemahasiswaan seperti Bersua-Bersuara dan Cahaya Sintas mencerminkan langkah konkret dalam pelebagaan perlindungan. Namun demikian, keberadaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang menyeluruh bagi korban, mengingat masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya mekanisme pendampingan korban.

Pada aspek normatif, nilai-nilai perlindungan perempuan, kesetaraan gender, dan anti-kekerasan mulai diarusutamakan melalui kegiatan edukatif, advokasi, dan kampanye sosial yang dilakukan oleh berbagai lembaga di kampus. Meskipun demikian, norma sosial yang masih mengandung stigma terhadap korban menjadi hambatan dalam pelebagaan nilai-nilai tersebut secara lebih luas dan mendalam. Sementara itu, pada aspek kognitif, pemahaman civitas akademika terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran masih belum menyeluruh. Budaya diam, rasa takut untuk melapor, serta rendahnya literasi terhadap kekerasan non-fisik seperti kekerasan verbal, emosional, dan seksual menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan kesadaran kolektif yang mendukung proses pelebagaan secara utuh.

Dengan demikian, meskipun secara struktural dan formal kebijakan perlindungan telah tersedia, proses pelebagaan di Universitas Diponegoro masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, penyadaran budaya kampus, serta pengembangan sistem pelaporan yang responsif. Pelebagaan yang efektif harus mampu menciptakan ekosistem kampus yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan, sehingga dapat menjamin perlindungan menyeluruh bagi remaja perempuan dalam menjalani kehidupan akademik secara bermartabat.

Pengalaman mahasiswa perempuan yang menjadi penyintas kekerasan dalam pacaran menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga verbal dan emosional, yang sering kali lebih sulit dikenali. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya memengaruhi kesehatan

mental dan emosional korban, tetapi juga berimbas pada prestasi akademik dan kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pola-pola kekerasan yang bersifat manipulatif agar korban dapat lebih mudah mengenali dan melindungi diri dari hubungan yang tidak sehat. Pengalaman mahasiswa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran menunjukkan bahwa mereka sering kali merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan mengalami dampak psikologis yang serius. Dukungan dari lembaga kampus, seperti Satgas PPKPT, masih dirasakan kurang optimal, dalam hal merespon, pendampingan dan konseling.

Kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang kekerasan dalam pacaran menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Namun, rendahnya tingkat kesadaran, normalisasi kekerasan, serta kurangnya edukasi yang memadai mengakibatkan banyak mahasiswa, terutama perempuan, terjebak dalam hubungan yang berpotensi berbahaya. Program-program guna penanganan dan pencegahan telah dilakukan beberapa dengan baik. Kerjasama kemitraan dengan lembaga eksternal, seperti organisasi non-pemerintah dan lembaga hukum, juga telah memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk bantuan hukum dan psikologis.

Namun, sejumlah tantangan masih menghambat efektivitas perlindungan bagi mahasiswa perempuan dari kekerasan dalam pacaran. Faktor internal, seperti kurangnya edukasi dan sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta prosedur yang belum terstruktur dengan jelas, menjadi kendala utama. Selain itu, faktor eksternal seperti stigma sosial dan tekanan lingkungan turut

memperburuk situasi. Kurangnya regulasi spesifik terkait kekerasan dalam pacaran juga mencerminkan bahwa isu ini belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan kampus.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap mahasiswa perempuan dari kekerasan dalam pacaran di Universitas Diponegoro.

Pertama, universitas perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan dalam pacaran secara berkelanjutan. Upaya ini harus melibatkan partisipasi aktif mahasiswa serta memanfaatkan berbagai metode, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye media sosial, guna menjangkau lebih banyak individu dan meningkatkan kesadaran kolektif. Dan kampanye untuk mengurangi stigma sosial terkait kekerasan dalam pacaran harus digalakkan agar mahasiswa merasa lebih nyaman dalam melapor dan mencari bantuan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui media sosial serta berbagai kegiatan kampus yang melibatkan seluruh civitas akademika guna menciptakan budaya kampus yang lebih peduli dan inklusif.

Kedua, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pelaporan serta akses terhadap layanan pendampingan bagi korban. Ini mencakup penyediaan saluran komunikasi yang lebih mudah dijangkau, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan sumber daya lembaga perlindungan, seperti Satgas PPKPT, FWU, Bersua-Bersuara, Cahaya Sintas, dan Badan Eksekutif Mahasiswa sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada korban. Langkah ini meliputi pelatihan bagi anggota lembaga dalam menangani kasus kekerasan serta penyediaan layanan konseling psikologis yang profesional dan responsif.

Keempat, universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk menilai efektivitasnya. Umpan balik dari mahasiswa, terutama para penyintas, harus menjadi bagian dari evaluasi ini guna memastikan bahwa sistem perlindungan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Terakhir, pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan kebijakan yang komprehensif, tegas, dan berkelanjutan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan dalam pacaran. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pelaporan yang jelas, perlindungan bagi korban, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku guna menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Universitas Diponegoro diharapkan dapat membangun lingkungan kampus yang lebih aman, suportif, dan bebas dari kekerasan dalam pacaran, sehingga kesejahteraan mahasiswa dapat lebih terjamin.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa kendala yang menjadi keterbatasan dalam proses pengumpulan data. Hambatan utama adalah kesulitan menghubungi narasumber, yang sering kali sulit diakses dan lambat merespons, sehingga menyebabkan keterlambatan wawancara. Proses administrasi pengajuan surat izin penelitian juga cukup rumit, dengan beberapa penolakan dan prosedur birokrasi yang memakan waktu. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data sekunder relevan menghambat kelengkapan referensi. Tantangan lain muncul karena sensitivitas topik, yang membuat narasumber enggan memberikan informasi, khususnya korban kekerasan, sehingga diperlukan pendekatan hati-hati yang memperlambat proses. Sebagian wawancara juga dilakukan secara daring, yang memengaruhi kedalaman interaksi dan dinamika penggalian data.